

Polisi Bubarkan Pengunjung Waterboom Lippo Cikarang

BEKASI (IM) – Pengunjung Waterboom Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi dibubarkan secara paksa karena terdapat kerumunan.

Kapolsek Cikarang Selatan Kumpul Sukadi menyebutkan, selama pandemi virus korona atau Covid-19, waterboom itu sebenarnya tetap beroperasi. Namun, pengunjung hanya dibatasi 250 sampai 500 orang dari total kapasitas sekitar 7.000-an orang.

“Itu tadi karena pengunjung banyak saya dapatkan laporan dari masyarakat tapi tidak hanya laporan dari masyarakat, anggota kami juga sudah melakukan penjagaan, tapi karena terlalu padat pengunjung akhirnya kami bubarkan,” ungkap Sukadi ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (11/1).

Membludaknya para pengunjung di Waterboom Lippo Cikarang itu, kata Sukadi, karena pihak pengelola memberikan diskon secara berlebihan. Sehingga animo masyarakat berlebihan.

“Kenapa bisa padat, karena ada diskon gila-gilaan lah tiket masuknya itu yang

tadinya Rp95 ribu menjadi Rp10 ribu. Itu lah yang akhirnya bikin orang antusias ke waterboom gitu. Dan itu dijualnya lewat online, kita tidak tahu,” bebernya.

Selama pandemi kapasitas pengunjung memang dibatasi. Namun, karena mereka memberikan diskon secara besar akhirnya yang datang ke waterboom itu lebih dari batasan.

“Selama pandemi ini jadi menurut peraturan bupati katanya 50 persen, jadi yang datang kemarin 2.358,” kata Sukadi.

Sukadi melanjutkan, sebetulnya dari peraturan bupati, kegiatan di Waterboom bisa dimaklumi. Hanya saja terjadi kerumunan itu yang kemudian pihaknya membubarkan paksa para pengunjung.

“Jadi sebetulnya kalau dari sisi peraturan bupati masih bisa dimaklumi, masih ditolerir, tapi dari sisi kerumunan itu yang tidak bisa ditolerir makanya saya bubarkan,” bebernya.

Atas peristiwa itu, lanjut Sukadi, pihaknya sudah memanggil pihak manajemen dari Waterboom Lippo Cikarang untuk bisa menjelaskan perihal kerumunan itu. ● ber

Pemprov DKI Buka Lagi Pendaftaran Petugas Contact Tracer, Insentif Rp360.000 Per Hari

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran petugas untuk contact tracer atau pelacak kontak terkait Covid-19 untuk ketiga kalinya.

Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun resmi Instagram Dinas Kesehatan DKI Jakarta, @dinkesdki, petugas contact tracer akan mendapatkan insentif Rp 360.000 per hari untuk uang harian dan uang transportasi. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran untuk menjadi Petugas Contact Tracer (Pelacak Kontak) dalam rangka Penanggulangan COVID-19 di lingkungan DKI Jakarta,” demikian informasi yang disampaikan melalui akun tersebut, Senin (11/1).

Adapun beberapa persyaratan untuk petugas pelacak kontak yakni: minimal lulusan D III bidang ke-

sehatan, bisa mengoperasikan aplikasi di ponsel, diutamakan berdomisili di Jabodetabek, bersedia bekerja di puskesmas selama 8 jam per hari.

Syarat lainnya, bersedia ditempatkan di seluruh puskesmas Provinsi DKI Jakarta, bersedia melakukan pelacakan kontak erat di masyarakat. Masa kontrak tenaga pelacak kontak itu sampai 31 Maret 2021. Adapun batas pendaftaran dan pengunggahan formulir paling lambat 12 Januari 2021 pukul 06.00 WIB atau besok pagi.

“Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta mengunggah ijazah terakhir dan surat keterangan sehat dalam bentuk pdf ke tautan berikut: <http://bit.ly/PendaftaranTenagaTracerGel3>,” demikian informasi di akun Instagram tersebut. Hasil seleksi untuk petugas contact tracer nantinya akan diumumkan melalui kanal resmi Dinkes Provinsi DKI Jakarta. ● osm



USUT KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN TOILET

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Forum Pembela Honorer Indonesia saat menggelar aksi di depan gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (11/1). Mereka menuntut agar KPK mengusut proyek pembangunan water closet (WC) atau toilet yang menelan biaya Rp196 juta untuk 1 toilet di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Hari Pertama Diberlakukan PPKM, Penumpang KRL Turun 13 Persen

JAKARTA (IM) - DKI Jakarta mulai menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Senin (11/1). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melaporkan bahwa kondisi seluruh stasiun terpantau lancar, kondusif, dan pengguna tetap tertib untuk antre naik KRL.

Hingga pukul 08.00 WIB, jumlah pengguna KRL tercatat sebanyak 95.440 orang. Jumlah tersebut berkurang 13 persen, dibanding waktu yang sama pada Senin pekan lalu, dengan total penumpang 109.297 orang.

“KAI Commuter mulai hari ini menyesuaikan operasional KRL dengan 964 perjalanan KRL per hari, dimulai pukul 04.00-22.00 WIB sejalan dengan pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali,” ujar Vice President Corporate Communication PT KCI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Senin (11/1).

Sejumlah stasiun mencatat penurunan jumlah pengguna KRL, antara lain Stasiun Citayam dengan

total 8.098 penumpang. Jumlah tersebut turun 4 persen dibanding waktu yang sama pekan lalu. Sementara itu, jumlah penumpang KRL di Stasiun Bogor sebanyak 6.225 pengguna atau turun 27 persen. Untuk Stasiun Rangkasbitung sebanyak 2.871 pengguna atau turun 13 persen.

“KAI Commuter berharap para pengguna dapat mengatur perjalanannya dengan lebih fleksibel dan memiliki kesadaran untuk tidak naik ke dalam kereta yang telah terisi oleh para pengguna sesuai marka yang ada. Informasi jadwal, posisi kereta, dan pantauan kepadatan di stasiun dapat dilihat melalui aplikasi KRL Access,” ujar Anne.

Seperti diketahui, PPKM ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan untuk masyarakat di Jawa dan Bali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung program tersebut karena dinilai dapat menekan penularan Covid-19 yang saat ini terus terjadi di Ibu Kota. Ia juga menilai kebijakan PPKM ini membuat penanganan Covid-19 di Jakarta dengan wilayah penyangga bisa lebih terintegrasi. ● osm

4 Metropolis

IDN/ANTARA



HARI KETIGA PENCARIAN KORBAN SJ 182

Helikopter EC 725 Caracal TNI AU terbang di atas KRI I Gusti Ngurah Rai-332 saat pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (11/1). Operasi pertolongan dan pencarian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 pada hari ketiga difokuskan pada pencarian di bawah permukaan laut, baik untuk jenazah penumpang, serpihan potongan bagian pesawat terbang, maupun kotak hitam.

DKI Berlakukan PSBB Ketat, Angkutan Umum Hanya Diizinkan Angkut Penumpang 50%

Ada 10 aktivitas yang diatur dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Aktivitas tersebut dari mulai tempat kerja, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

JAKARTA (IM) – Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Ibukota membuat sejumlah aturan kembali diberlakukan, antaranya kapasitas angkutan umum yang diizinkan hanya boleh angkut penumpang 50%.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengawal kebijakan tersebut. Dia menyebut polisi akan meningkatkan pengawasan di terminal-terminal.

“Kita akan memeriksa terminal-terminal dan stasiun untuk memastikan bahwa angkutan 50 persen,” katanya, Senin (11/1).

Dia menegaskan, dengan adanya aturan tersebut diharapkan bisa ditaati oleh para supir angkut serta pengusaha angkutan kendaraan umum. Namun, terkait sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan tersebut, Sambodo mengatakan masih akan melakukan koordinasi dengan pemprov DKI Jakarta terkait hal tersebut.

“Kalau sanksi nanti kita akan kordinasikan lagi,” tegasnya.

Dia menambahkan, selama aturan PSBB ketat tersebut pihak Ditlantas Polda Metro Jaya juga masih belum akan

menerapkan aturan ganjil genap di masyarakat. Selain itu, Sambodo mengatakan polisi juga tidak akan melakukan penyekatan selama kebijakan tersebut berlangsung.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB ketat mulai Senin 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Pemberlakuan PSBB ketat tersebut dikarenakan kasus Covid-19 di Ibu Kota semakin mengkhawatirkan. Dia memaparkan saat ini ada 17 ribu lebih kasus Covid-19 di Jakarta.

Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak terjadi pandemi di Tanah Air pada Maret 2020 lalu. Dia mengatakan PSBB ketat perlu diterapkan kembali untuk menekan laju penambahan kasus Corona.

Ada 10 aktivitas yang diatur dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Aktivitas tersebut dari mulai tempat kerja, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

1. Tempat kerja atau perkantoran pemerintah, BUMN, BUMD, maupun swasta melakukan 75% Work From Home;

2. Kegiatan sektor esensial seperti sektor energi, komunikasi, IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan objek

vital nasional. Selain itu pasar, swalayan, supermarket bisa bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;

3. Kegiatan konstruksi bisa berjalan 100% dengan prokes ketat;

4. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh;

5. Kegiatan restoran hanya boleh menerima dine-in sampai pukul 19.00 WIB dengan kapasitas 25%. Namun, boleh take away 24 jam atau sesuai jam operasional;

6. Kegiatan pusat perbelanjaan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB;

7. Kegiatan peribadatan tetap diberi batasan kapasitas 50%;

8. Kegiatan fasilitas kesehatan bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan;

9. Kegiatan area publik di fasilitas umum dan semua kegiatan sosial budaya sementara ini dihentikan;

10. Kegiatan pada moda transportasi: kendaraan umum maksimal 50%, dan ojek online/pangkalan dibolehkan dengan syarat penerapan protokol kesehatan. Osm

Pantau Wilayah Zona Merah Covid-19, Wakapolda Ngantor di Polsek Cimanggis

DEPOK (IM) - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo, Senin (11/1) ber Kantor di Polsek Cimanggis, Depok. Hal itu dilakukan untuk memantau wilayah-wilayah yang masih dalam zona merah Covid-19.

“Sesuai perintah Bapak Kapolda Metro Jaya pada hari Senin beliau menyampaikan

akan berkantor di polsek di wilayah-wilayah jajaran PMJ,” kata Hendro di Depok, Senin (11/1/2021).

Wakapolda tiba di Polsek Cimanggis dan kemudian melakukan pemantauan di RW 10 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Depok. Di sana ia melakukan pengecekan di Kampung Tangguh yang ada di wilayah RW 10 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. “Sehingga saya mewakili Pak Kapolda tadi ke Polsek Cimanggis juga mengecek Kampung Tangguh di Cimanggis yang ada di RW 10 Kelurahan Tugu,” ujar Hendro.

Setelah dilakukan pengecekan bisa terlihat bagaimana penanganan Covid-19 di Kota Depok. Sinergi banyak pihak diperlukan dalam menangani dan memutus mata rantai Covid-19.

“Kita bisa melihat

bagaiman Covid terus naik, tapi tentunya ada upaya yang harus dilakukan bersama antara TNI-Polri, Dinkes dan masyarakat. Kita lihat di RW bagaimana bisa mengatasi warganya yang terkena Covid baik itu testing, tracing dan treatment sehingga harapan kita ke depan Covid bisa diatasi dan warga DKI dan Indonesia bisa beraktivitas seperti dulu lagi,” katanya menambahkan.

Dari hasil pemantauan, Wakapolda menuturkan, apa yang dilakukan di RW 10 ini bisa disebarkan ke wilayah lain. Sehingga penanganan Covid-19 di Kota Depok dapat dilakukan dengan baik.

“Ya tentunya yang di RW 10 bisa kita bawa pada RW lain di wilayah Depok biar bisa mengatasi ketika warganya ada yang terkena. Dan bisa menekan penyebaran,” tandasnya. ● osm

Anggota DPRD Depok Minta Penanganan Covid-19 Dievaluasi

DEPOK (IM) – Anggota Komisi A yang mendampingi Pemerintah DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Ikhravany Hilman, menilai perlunya evaluasi penanganan pandemi Covid-19 secara bersama-sama dengan Pemerintah Kota Depok. Meskipun dimungkinkan secara hukum bagi Pemkot Depok untuk bergerak taktis dalam situasi kedaruratan, tetapi proses check and balance dinilai tetap perlu dilakukan, misalnya dalam hal evaluasi anggaran penanganan pandemi.

“Dengan peraturan pemerintah yang ada, yang memungkinkan pemerintah kota melakukan tindakan-tindakan kedaruratan sendiri tanpa DPRD, membuat DPRD itu tidak banyak tahu soal itu (sejauh mana penanganan pandemi),” kata anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Ikhravany Hilman, Senin (11/1).

Menurut pria yang akrab disapa Ikra itu, permintaan refocusing anggaran kemungkinan akan diajukan lagi oleh Pemkot Depok untuk penanganan pandemi pada tahun ini. Namun, Ikra

mempertanyakan sejauh mana refocusing itu berdampak terhadap efektivitas penanganan pandemi.

“Kemarin itu sampai Rp 200 miliaran di-refocusing. Mau Rp 500 miliar (refocusing) nggak masalah, yang penting jelas buat apa dan memang ditujukan untuk mengatasi (pandemi),” ujarnya.

“Harusnya bisa bangun jalan, bangun sekolah, bangun apa sebagainya, dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tetapi alih-alih turun menjadi zona oranye atau hijau, kita berada di zona merah,” tambah Ikra.

Pandemi Covid-19 di Depok, sebagaimana juga terjadi di banyak wilayah di Indonesia, tak terkendali sejak pekan kedua November. Lonjakan demi lonjakan jumlah pasien Covid-19 terus terjadi. Data terbaru kemarin, masih ada 3.824 pasien/kasus aktif Covid-19 di Depok yang harus menjalani isolasi dan dirawat di rumah sakit. Angka ini merupakan yang tertinggi selama pandemi melanda. Di sisi lain, sejak pekan lalu, kapasitas isolasi pasien Covid-19 di Depok sudah tembus 85 persen. Sementara itu, 56 ICU yang tersebar di 21 rumah sakit se-Depok sudah terisi 90 persen lebih. ● ber

KRL Beroperasi Hanya Sampai Pukul 22.00 WIB Selama PPKM Jawa - Bali

JAKARTA (IM) - Kereta Rel Listrik (KRL) melanjutkan pembatasan jam operasional selama penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2020.

Operasional KRL akan kembali berlangsung mulai pukul 04.00 hingga 22.00 WIB selama adanya PPKM tersebut. KAI Commuter Line tetap melayani pelanggan dengan 964 perjalanan KRL per harinya menggunakan 91 rangkaian KRL.

“Dengan pembatasan jam operasional ini dan berbagai pengendalian mobilitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru lalu, jumlah pengguna KRL rata-rata mencapai 300.000 pengguna per hari. Sementara sebelumnya di masa PSBB Transisi volume pengguna KRL setiap hari juga mencapai 400.000 orang,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba

dalam keterangannya, Senin (11/1).

Anne memastikan, pihaknya juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada pengguna KRL mulai pengukuran suhu tubuh, wajib menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL, serta menjaga jarak.

“KAI Commuter mengingatkan para pengguna agar tetap mengikuti antrean penyekatan menuju ke peron yang ada di stasiun terutama pada jam-jam sibuk. Dalam mengantre, para pengguna hendaknya senantiasa menjaga jarak dan tidak lalai dalam memakai masker,” ujarnya.

KAI Commuter juga masih memberlakukan aturan tambahan pada masa pandemi ini, yaitu bagi lansia yaitu hanya dapat naik kereta pada pukul 10.00 WIB-14.00 WIB atau di luar jam sibuk. Sementara bagi balita tidak diperkenankan naik KRL. ● osm

Wakil Wali Kota Bekasi Kirimkan Doa untuk Korban Pesawat Sriwijaya Air

KOTA BEKASI (IM) - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Senin (11/1) menjadi pembina apel yang bertempat di Stadion Patriot Chandrabhaga Kota Bekasi. Senin, (11/1).

Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bekasi menegaskan kedisiplinan aparatur pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk taat pada peraturan dan selalu rapih berpakaian setiap harinya.

Tri Adhianto juga mengucapkan dan mengirimkan doa kepada korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, bersama para pegawai Pemkot Bekasi, bahkan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ada yang berkedudukan warga Kota

Bekasi.

Selain kedisiplinan dan doa, Tri Adhianto pada apel pagi itu juga menyampaikan beberapa point, terutama terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang pada saat ini sudah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang saat ini masih terus bertambah.

“Dengan adanya PPKM ini yang sebelumnya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mudah-mudahan bisa turun angka yang terparap Covid-19,” ujarnya dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Senin (11/1).

Senin (11/1).

Ia berharap, sebagai aparat Pemerintah Kota Bekasi, pihaknya dapat bersinergi dengan aparat maupun warga sekitar, dengan mengikuti aturan pemerintah yang berlaku pada saat ini, melalui sosialisasi ke masyarakat dengan menertibkan 3M yakni, memakai masker, mencuci tangan dan selalu menjaga jarak juga mencegah adanya kerumunan-kerumunan.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. ● mdl

FOTO : HUMAS PEMKOT BEKASI



Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (kiri) bertindak sebagai Pembina saat Apel di Stadion Patriot Candrabhaga, Senin, (11/1) pagi.